

## Perubahan Spasial Permukiman Sulaa Baubau Pasca Reklamasi Pantai

Ishak Kadir<sup>1</sup>, Achmad Djunaedi<sup>2</sup>, Sudaryono<sup>3</sup>, Bambang Hari Wibisono<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor Arsitektur & Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jl. Grafika 2 Yogyakarta (ishak69ars@gmail.com)

<sup>2,3,4</sup> Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Jl. Grafika 2 Yogyakarta

### Abstract

*Sulaa is one of the coastal villages in Baubau, most people work as fishermen, therefore the sea is a very important part of their lives. Local Government has reclaimed Sulaa coast as an effort to solve abrasion that was faced by Sulaa's people every year. The reclamation has impact on the social, economic, and cultural community. This paper aims to show the variety of spatial changes of settlements and spatial behavior of people in the post-reclamation of the coastal settlement. This research uses Phenomonology paradigm and inductive analysis methods. The main instrument is the researcher ownself with the hypothesis that a researcher can see the object in its context, observes directly and improves the awarness continuously.*

*This research showed there are spatial changes ocured in post-reclamation of the coastal settlement, includes (1) a change in the spatial patterns and density of buildings, which is followed by a change in the orientation of the building and adjustment of space in their homes, especially the buildings in the area of reclamation;(2) spatial patterns of social, economic and cultural community tends to be oriented to the shore.*

**Keywords:** *spatial changes, post-reclamation of the coastal settlement, Sulaa*

### 1. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, diperkirakan 60% dari penduduk Indonesia hidup dan tinggal di daerah pesisir. Sekitar 9.261 desa dari 64.439 desa yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa atau permukiman pesisir (Supriharyono, 2002).

Undang-undang RI nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004, memberi kewenangan penuh dalam pengelolaan sumberdaya alam di kawasan pesisir dan lautan sampai dengan 12 mil laut untuk provinsi dan 4 mil laut untuk kabupaten/kota. Salah satu dampak dari undang-undang tersebut adalah munculnya program pemerintah daerah berupa reklamasi kawasan pesisir pantai atau juga disebut reklamasi pantai.

Reklamasi pantai menurut Suhud dalam Wunas (2003), dilakukan dengan tujuan 1) mem-

peroleh lahan baru yang dapat mengurangi tekanan atas kebutuhan lahan di bagian kota yang sudah padat, 2) menghidupkan kembali transportasi air sehingga beban transportasi darat berkurang, 3) membuka peluang pembangunan nilai tinggi; 4) meningkatkan pariwisata bahari, 5) meningkatkan pendapatan daerah, 6) meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pantai, dan 7) meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.

Sulaa merupakan salah satu kelurahan pesisir di bagian Barat Kota Baubau, terletak kurang lebih delapan kilometer dari pusat Kota Baubau. Secara administratif, Permukiman Sulaa termasuk dalam wilayah Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas wilayah Kelurahan Sulaa seluruhnya 7,54 km<sup>2</sup> (754,36 ha). Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Sulaa merupakan kelompok masyarakat pendatang dari daratan dan pulau-pulau di sekitar Buton, terdiri dari beberapa

kelompok sub etnis Buton. Permukiman Sulaa merupakan salah satu pusat kegiatan tenun tradisional di wilayah Kota Baubau yang mewarnai aktivitas kaum perempuan dewasa dan ditemukan di seluruh hunian dan ruang permukiman dengan pola ruang yang beragam.

Selain itu, masyarakat Sulaa teguh memegang tradisi budaya baik yang berhubungan dengan hari-hari besar agama Islam maupun tradisi adat Buton. Menurut Darmawan dalam Kadir (2014), bahwa Islam yang bersemi di Buton diperkaya dengan ritual dan tradisi lokal yang bernuansa Hindu. Jejak tradisi Hindu yang masih ada adalah kebiasaan memberikan sesajen (*kaago*), kepercayaan tentang setan (*kanjoli*), hingga keyakinan tentang adanya tempat keramat.

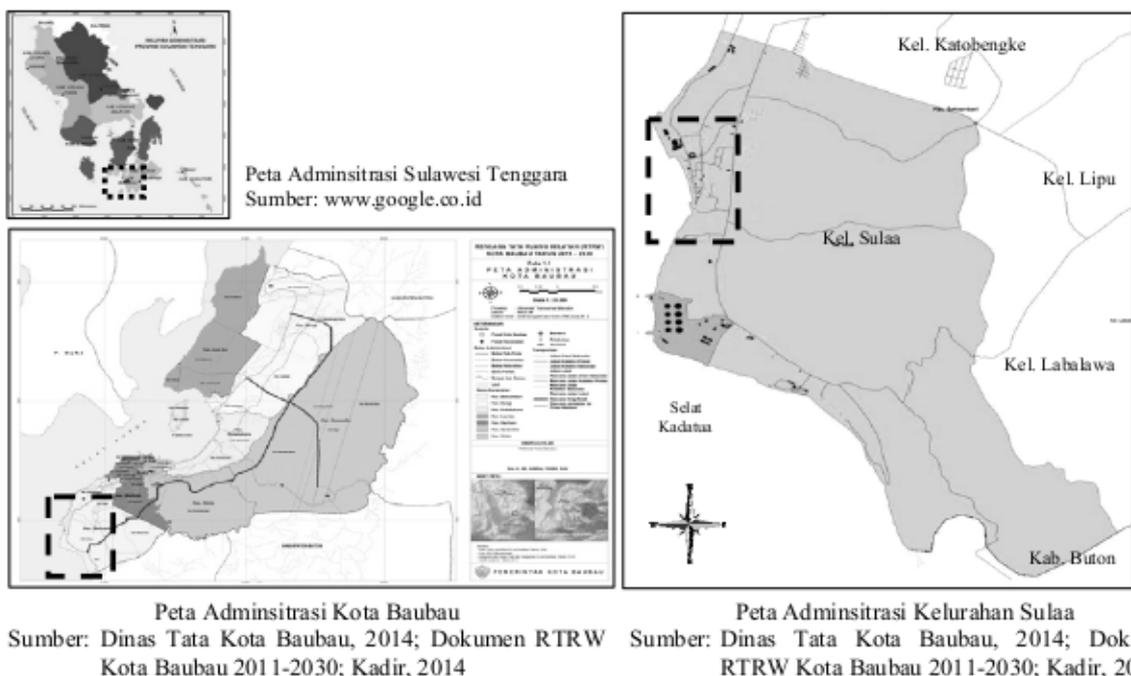
Pemerintah Kota Baubau mereklamasi pantai Sulaa sebagai salah satu upaya menyelesaikan permasalahan abrasi pantai yang terjadi setiap tahun. Kegiatan reklamasi pantai dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada awal Agustus 2011 dan berakhir pada Januari 2013. Kegiatan reklamasi pantai meliputi seluruh wilayah pantai sepanjang 500 meter yang menghubungkan area dermaga dengan jalan utama di bagian Utara kawasan. Dampak reklamasi pantai, memberikan manfaat dan solusi permasalahan abrasi pantai. Di

sisi lain, memunculkan permasalahan baru bagi warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.

Tulisan ini bertujuan menunjukkan perubahan spasial permukiman dan perilaku keruangan masyarakat pasca reklamasi pantai. Pembahasan pada tingkat mikro dan meso (kawasan), dengan pertimbangan keterhubungan pola ruang dan aktivitas.

## 2. Fundamental

Menurut Doxiadis (1968), permukiman terdiri atas 1) *The content* atau isi yang berupa manusia dan aktivitas; 2) *The container* berupa tempat/wadah fisik manusia tinggal yang meliputi elemen alam atau buatan. Isi dan tempat/wadah ini dapat dibagi 5 elemen utama yang dikenal sebagai teori "Ekistics" yaitu 1) *Nature* atau alam, sebagai lokus/tempat yang membatasi dan menciptakan terbentuknya/berfungsinya sebuah permukiman, 2) *Man* atau manusia, sebagai subyek yang mengkreasi sekaligus mengisi permukiman, 3) *Society* atau masyarakat, sekelompok orang yang beraktivitas dan mengkreasi permukiman sesuai dengan kebutuhannya, 4) *Shells* atau cangkang/wadah yaitu suatu struktur yang di dalamnya manusia dapat hidup dan berkehidupan



**Gambar 1.** Posisi Permukiman Sulaa terhadap Kelurahan Sulaa dan Kota Baubau

sesuai fungsinya, 5) *Network* atau jejaring, baik alamiah maupun buatan memfasilitasi berfungsinya suatu permukiman secara utuh (misalnya jalan, jaringan listrik dan air). Sementara itu, Rapoport (1969) melihat permukiman sebagai suatu sistem tunggal dimana rumah, permukiman dan lansekap merupakan produk dari sistem kultural. Sebagai sistem kultural antara manusia dan permukiman secara fisik dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

Ruang merupakan ruang tiga dimensional yang mengelilingi manusia, relasi antara elemen-elemen di dalamnya membentuk tatanan tertentu dan disebut organisasi spasial. Selanjutnya dikatakan bahwa permukiman merupakan hasil relasi manusia dengan lingkungan, dimana permukiman berfungsi sebagai pusat dan tempat berkumpulnya manusia (bertempat tinggal), tidak hanya merupakan sebuah tempat, tetapi merupakan bagian dari sebuah lingkungan yang lebih besar (Rapoport, 1977).

Cara hidup dan sistem kegiatan akan menentukan macam dan wadah kegiatan. Wadah adalah ruang-ruang yang saling berhubungan dalam satu sistem tata ruang dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan. Keputusan setiap individu manusia atau sekelompok manusia untuk merumuskan pandangannya terhadap dunia, merumuskan nilai-nilai kehidupan yang diyakini bersama, menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari yang tertuang dalam sistem kegiatan dan wadah ruangnya (sistem seting). Pendekatan ini menegaskan bahwa aspek psikologi manusia dan kultur suatu masyarakat akan menentukan bentuk aktivitas dan wadahnya (Rapoport dalam Haryadi, 2010).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Habraken bahwa pembentukan ruang merupakan sebuah proses. Proses ini adalah refleksi relasi antara aktivitas manusia, tatanan sosial, dan lingkungan. Pada relasi ini ditekankan adanya latar belakang budaya manusia seperti pandangan hidup, kepercayaan yang dianut, nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang yang akan menentukan perilaku seseorang, antara lain tercermin dalam cara hidup dan peran yang dipilihnya dalam masyarakat (Habraken dalam Kadir, 2014).

Secara ekologis dari segi pengelolaan secara umum, wilayah pesisir telah disepakati untuk didefinisikan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, yang memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar dengan pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross shore*), apabila ditinjau dari garis pantainya (*coast line*). Wilayah pesisir akan mencakup semua wilayah yang ke arah daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang berkaitan dengan laut dan ke arah laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di daratan. Tipologi lingkungan permukiman pesisir/ tepi pantai dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu: 1) permukiman tradisional bagi petani nelayan, petani garam, petani tambak udang, petani dan peternak, petani budidaya laut dan petani pendulang batuan; 2) permukiman modern bagi penjual jasa pariwisata dan profesi campuran yang berkaitan dengan kegiatan industri pelabuhan dan perikanan (Dahuri, 1996; Wahab, 1998; Prayitno, 2004).

Sejarah awal keberadaan lingkungan permukiman nelayan dapat dibedakan atas dua kronologis, yaitu: 1) Perkembangan yang dimulai oleh kedatangan sekelompok etnis tertentu di suatu lokasi pantai, yang kemudian menetap dan berkembang secara turun temurun; 2) Perkembangan sebagai daerah alternatif permukiman, karena peningkatan arus urbanisasi, yang berakibat menjadi kawasan liar dan kumuh perkotaan. Berdasarkan wilayah kebudayaan (*cultural area*) daerah kebudayaan pesisiran adalah suatu wilayah kebudayaan yang pendukungnya adalah masyarakat yang proses enkulturasi dan sosialisasinya berada dan tinggal di sepanjang garis pantai. Corak masyarakat pesisir pada umumnya ditandai dengan sikap-sikapnya yang lugas, egaliter, spontan, tutur kata yang digunakan cenderung kasar, dan dalam berkomunikasi cenderung mementingkan isi yang ingin disampaikan (substentif) dari pada cara penyampaiannya (Silas, 1985; Mattulada, 1997).

Antoniades (1990) menyatakan bahwa transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap *ultimate*, perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari

bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggunakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.

Sementara itu, Habraken (1982) menyatakan bahwa perubahan dapat dilihat dari: 1) perpindahan (*movement*) adalah perubahan yang disebabkan oleh perpindahan atau pergeseran elemen pembentuk ruang pada suatu site, 2) penambahan (*addition*) adalah penambahan suatu elemen dalam suatu site, 3) pengurangan (*elimination*) adalah pengurangan suatu elemen dalam suatu site, seringkali transformasi itu disebabkan oleh kombinasi antar ketiganya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa permukiman pesisir adalah permukiman yang secara fisik terletak di daerah transisi antara wilayah darat dan laut dengan mayoritas masyarakat menggantungkan diri pada profesi sebagai nelayan. Komunitas nelayan terbentuk sebagai komunitas dengan kebudayaan yang dipengaruhi oleh sistem nilai dan simbol masyarakat maritim menjadi referensi masyarakat untuk membentuk permukimannya sebagai bagian dari produk kebudayaannya. Ruang merupakan ruang tiga dimensional yang mengelilingi manusia, relasi antara elemen-elemen di dalamnya membentuk tatanan tertentu dan disebut organisasi spasial yang merupakan refleksi relasi antara aktivitas manusia, tatanan sosial, dan lingkungan. Proses perubahan terjadi secara berangsur-angsur, dan dapat dilihat pada proses perpindahan, penambahan, pengurangan atau kombinasi antar ketiganya.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan mengangkat fenomena spasial Permukiman Sulaa dan perilaku keruangan pemukimnya pasca reklamasi pantai. Instrumen utama adalah peneliti sendiri dengan pertimbangan bahwa peneliti mampu melihat objek dalam konteksnya, melakukan observasi partisipatif terhadap objek yang diteliti dalam setting alamiahnya dan mengembangkan kesadaran terus menerus (intensional). Penelitian dimulai dengan *grand tour* untuk menggali topik atau fenomena dan dilanjutkan dengan *mini tour* untuk menggali tema-tema dalam tiap topik. Analisis dalam penelitian ini,

menggunakan metode induktif. Kesamaan makna informasi dikategorisasikan untuk memproduksi tema-tema dan kesamaan tema dikategorisasikan untuk menghasilkan konsep.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Permukiman Sulaa mempunyai situasi yang unik, karena terkonsentrasi di wilayah pesisir yang diapit oleh perbukitan batu dan perairan Selat Kadatua dengan gelombang laut yang cukup tinggi pada musim-musim tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan keterbatasan ruang dan abrasi pantai. Lokus penelitian memiliki luasan yang terbatas sekitar 30,75 Ha dari total luas kelurahan Sulaa 7,54 km<sup>2</sup> (754,36 ha). Permukiman Sulaa meliputi RW2 terdiri dari 2 RT dan sebagian RW1 terdiri dari 2 RT. Jumlah penduduk dan kepala keluarga berdasarkan data profil Kelurahan Sulaa tahun 2014 yaitu 1.187 jiwa dan 383 KK. Jumlah rumah sebanyak 293 unit rumah.



Sumber: dimodifikasi dari Dinas Tata Kota Baubau, 2014

Gambar 2. Peta Lokus Penelitian

#### a. Pola Ruang Hunian

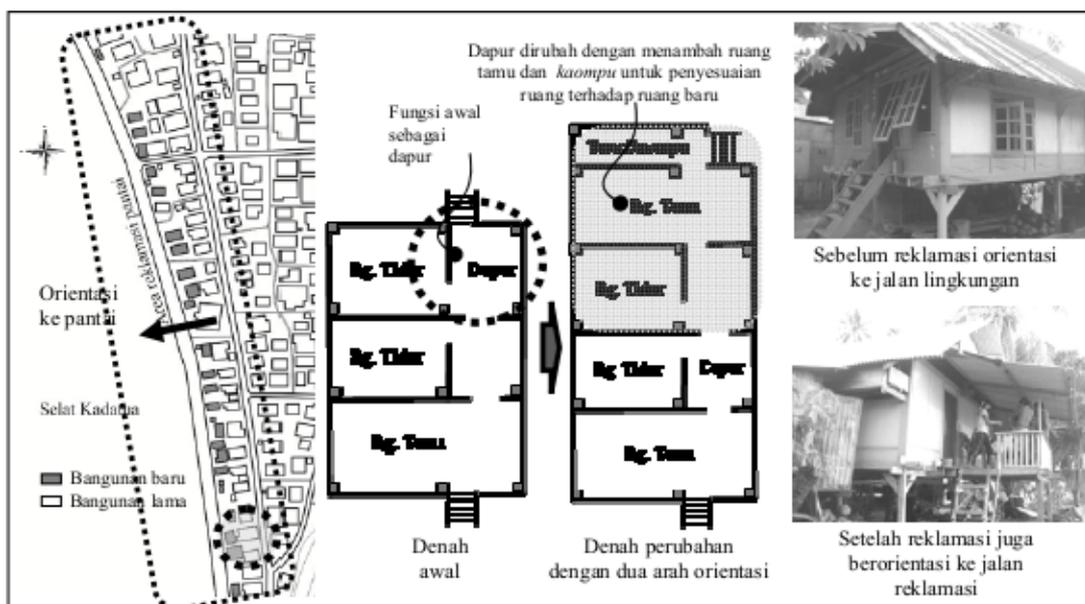
Rumah tinggal masyarakat pesisir Sulaa sekitar 163 unit rumah dari 293 unit rumah yang

ada, masih konsisten menggunakan bangunan rumah panggung non permanen dengan arsitektur tradisional Buton sebagai bangunan fungsional saat ini. Selebihnya merupakan bangunan non panggung permanen dan kombinasi keduanya. Sebelum reklamasi pantai, pola permukiman terbentuk secara linier mengikuti pola jalan, termasuk rumah tinggal di pinggir pantai dengan orientasi bangunan membelakangi laut. Pola pengembangan permukiman cenderung berorientasi ke bagian Utara kawasan yang relatif masih kosong dengan membeli lahan warga Katobengeke. Begitu pula pengembangan ke arah Timur di atas perbukitan dan kemiringan yang cukup terjal, meskipun dengan biaya konstruksi bangunan yang tinggi. Ruang sepanjang pantai digunakan untuk berbagai kebutuhan aktivitas nelayan, seperti memarkir perahu dan membangun bangunan *parapara* (gelagar) untuk menjemur rumput laut dan menyimpan peralatan.

Pasca reklamasi pantai, terjadi perubahan dalam pola penataan bangunan rumah tinggal, kepadatan dan orientasi bangunan, khususnya di area reklamasi. Kegiatan reklamasi pantai dan pembangunan jalan akses penghubung di atasnya, mendorong tumbuhnya hunian dan unit usaha ekonomi masyarakat di sekitar pantai. Kondisi tersebut bahkan terjadinya penambahan dan kepadatan

bangunan yang signifikan. Laju pertumbuhan bangunan tidak sebanding dengan ketersediaan lahan, sehingga memunculkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat lokal dan pemerintah daerah akan sulitnya pengendalian ruang yang akan bermuara kepada tumbuhnya area permukiman kumuh baru. Arah orientasi bangunan rumah yang semula membelakangi laut, kemudian berubah mengikuti pola jalan yang terbangun. Oleh karena itu, banyak bangunan rumah ditemukan mempunyai dua arah orientasi bangunan ke jalan lingkungan dan ke pantai.

Perubahan seting permukiman juga diikuti dengan perubahan spasial ruang secara mikro, yaitu terjadi perubahan susunan ruang di dalam rumah, bentuk struktur dan fasade bangunan serta pergeseran fungsi dan nilai ruang. Perubahan pada rumah panggung terjadi dengan cara penambahan ruang baru di bagian belakang rumah dengan fungsi ruang yang berbeda, sehingga ruang yang semula difungsikan sebagai dapur berubah fungsi menjadi ruang tamu dan tambahan ruang tidur bagi anggota keluarga maupun tambahan *kaompu* (teras) (gambar 3). Dengan pola perubahan ruang yang sama juga terjadi pada rumah non panggung permanen. Perubahan susunan ruang dan bentuk fasade bangunan merupakan bentuk penyesuaian ruang dengan ruang baru yang terbangun.



Sumber: Hasil observasi, 2013

Gambar 3. Pola penataan bangunan rumah tinggal

Terjadi perubahan bentuk bangunan rumah panggung non permanen ke rumah non panggung permanen disebabkan oleh berkurangnya pemahaman masyarakat pesisir Sulaa tentang filosofi rumah tradisional Buton seiring dengan proses transformasi yang terjadi dan adanya persepsi bahwa rumah permanen lebih mudah dalam perawatan dan daya tahan bangunan terutama ketahanan terhadap iklim di pesisir pantai (Kadir, 2013). Perubahan yang terjadi berimplikasi pada hilangnya ciri dan identitas arsitektur rumah tradisional Buton yang menjadi identitas dan karakter permukiman Sulaa selama ini. Di sisi lain, kualitas rumah dan lingkungan meningkat setelah reklamasi pantai, karena terhindar dari permasalahan abrasi yang terjadi setiap tahun. Kondisi tersebut mendorong pemilik rumah menata dan memperbaiki rumah serta membangun rumah sekaligus unit usaha di sekitar pantai. Dampak positif nampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan dampak negatifnya perubahan pada fungsi permukiman ke fungsi ganda yaitu rumah toko (Ruko). Berdasarkan kondisi tersebut, maka pola ruang hunian pasca reklamasi pantai cenderung berkembang ke arah pantai dengan memanfaatkan area reklamasi sebagai ruang hunian.

#### b. Pola Ruang Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama masyarakat Sulaa adalah nelayan (*pekabua*), sekitar 190 KK dan pengrajin tenun (*pandetanu*), sekitar 120 KK dari 383 KK yang ada. Kegiatan nelayan dan pengrajin tenun telah ada sejak kampung Topa (nama awal Sulaa) dihuni. Selebihnya bekerja sebagai PNS, pedagang antar pulau, pengusaha, buruh tani dan karyawan. Sebelum reklamasi pantai, masyarakat

nelayan ketika pulang melaut menggunakan ruang-ruang sepanjang pantai Sulaa dan lahan kosong milik warga untuk memarkir perahu dan menyimpan peralatan melaut. Keterbatasan lahan mendorong nelayan untuk menggunakan ruang di atas perairan pantai untuk membangun *parapara* (bangunan gelagar yang terbuat dari bahan kayu atau bambu) untuk berbagai kebutuhan nelayan, misalnya menjemur rumput laut dan menyimpan peralatan nelayan. Bangunan *parapara* dibangun, didanai dan digunakan secara bersama-sama berdasarkan konsensus yang dibangun berbasis nilai-nilai lokal masyarakat Sulaa.

Pasca reklamasi pantai, masyarakat nelayan mengalami kesulitan untuk memarkir perahu dan menyimpan peralatan ketika pulang dari melaut, dan selama ini menggunakan lahan kosong milik warga di area pantai. Hal ini berdampak pada pola perilaku keruangan nelayan dalam merespon perubahan spasial yang terjadi, yaitu: (i) perahu diparkir di perairan pantai, dengan konsekuensi kerugian yang diderita akibat kerusakan perahu, (ii) perahu yang berukuran kecil diparkir di trotoar jalan atau di ruang bawah rumah (*kapeo*). Selain itu, kesulitan dalam memarkir perahu, nelayan juga kehilangan properti yang selama ini digunakan bersama dengan nelayan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan ruang aktivitas nelayan dengan segala keterbatasan ruang yang dihadapi, maka warga merespon dengan saling memberi ruang dan saling membantu dalam mewadahi aktivitas mereka. Perilaku keruangan tercermin pada penggunaan ruang secara bersama-sama untuk menjemur rumput laut, memarkir perahu dan menyimpan peralatan nelayan.



Sumber: Hasil observasi, 2013

**Gambar 4.** Pola ruang nelayan

Kegiatan tenun merupakan kegiatan utama kaum perempuan dewasa masyarakat pesisir Sulaa dan merupakan salah satu mata pencaharian yang menopang kehidupan mereka. Kegiatan tenun ditemukan di ruang-ruang permukiman dengan memanfaatkan ruang hunian di dalam rumah, *kapeo* (ruang bawah rumah), halaman rumah dan ruang-ruang publik. Pada awalnya kegiatan tenun dilakukan di ruang *tanga* (ruang wanita), sebagai bentuk penghormatan wanita dalam keluarga Buton. Kemudian mengalami pergeseran ruang seiring dengan proses transformasi fisik di dalam rumah yang diikuti dengan pergeseran nilai dan fungsi ruang yang disebabkan karena (i) pertambahan jumlah anggota keluarga, dan (ii) pergeseran persepsi terhadap nilai ruang, terutama ruang yang berhubungan dengan kegiatan kaum perempuan di dalam rumah. Pergeseran spasial kegiatan tenun terjadi ke arah ruang bawah rumah (*kapeo*), halaman rumah dan ruang publik. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan perilaku keruangan yang semakin terbuka dan memudahkan terjadinya interaksi sosial dengan warga lainnya.

Kegiatan tenun di *kapeo* (ruang bawah rumah) dan halaman rumah ditandai dengan keberadaan bangunan *godegode* (fasilitas tempat duduk) dan bangsal tenun. Terdapat beberapa alasan warga melakukan kegiatan di luar rumah, yaitu menenun bersama di luar rumah memudahkan mereka berinteraksi dan dapat membantu warga lainnya yang mengalami keterbatasan ruang

aktivitas. Terdapat 6 unit bangsal tenun yang dibangun oleh pemerintah di atas lahan milik warga dengan memanfaatkan ruang antara rumah (batas kapling) dan halaman rumah. *Kapeo* (ruang bawah rumah) dan halaman rumah juga digunakan untuk membuka kios dan lapak jualan, gudang penampungan ikan, usaha pertukangan kayu dan bengkel motor. Membuka unit usaha dengan memanfaatkan ruang-ruang di lingkungan hunian warga, merupakan respon warga untuk mencari penghasilan tambahan bagi keluarga dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Sulaa, karena tidak adanya pasar maupun fasilitas perbelanjaan lainnya.

Pasca reklamasi pantai, kegiatan tenun tidak hanya ditemukan di lingkungan rumah tinggal, tetapi mengalami pergeseran pola kegiatan ke ruang publik. Eksistensi ruang tenun ditandai dengan tumbuhnya bangunan *godegode* (tempat duduk) di sepanjang jalan area reklamasi pantai. Kegiatan tenun umumnya dilakukan secara bersama-sama sebagai bagian dari konsesus ruang yang dibangun berdasarkan nilai-nilai lokal masyarakat Sulaa yang mengutamakan kebersamaan dalam ruang dan aktivitas.

Permasalahan ruang yang dihadapi oleh nelayan akibat adanya reklamasi pantai tidak demikian halnya dengan warga yang bukan nelayan yang mendapatkan nilai ekonomi dari kegiatan reklamasi pantai. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya



Sumber: Hasil observasi, 2013

**Gambar 5.** Pola ruang pengrajin tenun dan kegiatan ekonomi masyarakat

bangunan baru berupa rumah toko, kios jualan, dan warung di sepanjang area reklamasi pantai. Lahan tersebut digunakan oleh kerabat maupun yang bukan kerabat berdasarkan konsensus yang dibangun bersama dalam keluarga maupun dengan warga lainnya. Lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi produktif. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pola ruang mata pencaharian masyarakat pasca reklamasi pantai cenderung berkembang ke arah pantai dengan memanfaatkan area reklamasi membangun unit usaha sekaligus sebagai ruang hunian.

### c. Pola Ruang Interaksi Sosial

Keunikan pola interaksi sosial masyarakat Sulaa ditunjukkan dengan pola perilaku saling mengunjungi dan saling menyapa antar warga, baik di ruang hunian maupun di ruang publik. Pergeseran pola kegiatan ke luar rumah berdampak pada pola interaksi sosial warga yang semakin dinamis. Perjumpaan warga umumnya terjadi secara spontan dan sangat tergantung dengan kondisi dan keperluan warga. Radius keruangan dalam perjumpaan warga di *kapeo* dan halaman rumah melibatkan warga sekitar yaitu dua hingga tiga rumah di sekitarnya.

Ruang interaksi sosial warga juga ditemukan di ruang mata air, taman bersama dan dermaga. Keberadaan sumber mata air sebagai ruang inter-

aksi sosial warga didasarkan pada keunikan mata air secara fisik dan pemahaman spiritual masyarakat akan makna penting mata air terhadap keberlangsungan hidup mereka. Mata air digunakan sebagai sumber air minum, mandi dan mencuci pakaian. Melalui momen tersebut mereka saling berjumpa, berbagi ruang, berbagi pekerjaan dan berbagi pengalaman. Taman bersama digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti kegiatan pedagang kaki lima, tukang ojek, dan ruang bermain bagi anak-anak dan remaja pada sore hari dan waktu libur. Keterbatasan ruang dalam permukiman menyebabkan kurangnya ruang terbuka (*open space*).

Pasca reklamasi pantai, pola ruang interaksi sosial masyarakat terbentuk seiring dengan pergeseran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ke area reklamasi pantai. Keberadaan bangunan rumah toko, kios jualan, warung makan dan bangunan *godegode* (tempat duduk) di sepanjang jalan reklamasi menjadi penanda bagi terbangunnya ruang interaksi sosial masyarakat untuk saling berjumpa dan saling menyapa. Bangunan *godegode* yang ada di area reklamasi digunakan untuk berkumpul dan bersantai pada sore hari atau saat mereka tidak melaut. Anak-anak bermain dan memancing ikan di pondasi jalan, begitupula dengan kaum perempuan dewasa memanfaatkan



Sumber: Hasil observasi, 2013

Gambar 6. Pola ruang interaksi sosial

tangga yang ada di jalan reklamasi untuk berkumpul dan berbagi pekerjaan rumah tangga dengan warga lainnya. Hubungan sosial dan kekerabatan masyarakat cenderung semakin kuat setelah reklamasi pantai, karena frekuensi pertemuan warga semakin tinggi dengan adanya ruang-ruang bersama yang terbangun dan menjadi ruang perekat warga. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pola ruang interaksi sosial masyarakat pasca reklamasi pantai cenderung berkembang ke arah pantai dengan memanfaatkan area reklamasi untuk membangun fasilitas tempat duduk untuk berkumpul dan berjumpa dengan warga lainnya.

#### d. Pola Ruang Ritual Budaya

Masyarakat Sulaa sangat teguh memegang tradisi budaya yang merupakan warisan budaya pada masa Kerajaan/Kesultanan Buton. Terdapat beberapa kegiatan ritual tahunan maupun ritual yang bersifat temporal yang tetap dipertahankan dan dilaksanakan di mata air Topa dalam konteks kekinian. Kegiatan ritual *palantu* (melarung di laut) secara rutin dilaksanakan pada setiap pergantian musim dan melibatkan berbagai unsur, yaitu tokoh adat Sulaa, tokoh adat Labalawa selaku pemilik mata air, pemerintah kecamatan dan masyarakat Sulaa dan sekitarnya.



Sumber: Hasil observasi, 2012

**Gambar 7.** Pola ruang tradisi budaya

Ritual *palantu* bertujuan untuk memberi makan kepada raja laut yang diyakini sebagai penguasa laut, agar tidak diganggu pada saat melaut. Pola ruang ritual diawali dari rumah *mancuana* (ketua adat) Sulaa, kemudian sajian diarak ke mata air untuk dilakukan ritual dan selanjutnya dilarung di laut. Kegiatan ritual *palantu* selalu dirangkaikan dengan ritual pengobatan kepada seluruh warga di sekitar mata air.

Pasca reklamasi pantai, ritual pengobatan kepada warga mengalami perubahan pola ruang, yaitu kegiatan ritual pengobatan tidak lagi dilaksanakan di mata air. Pola ruang yang terbentuk adalah prosesi ritual dilaksanakan di rumah tokoh adat, kemudian sajian diarak ke tangga jalan reklamasi untuk prosesi ritual selanjutnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pola ruang beberapa ritual budaya masyarakat mengalami perubahan spasial dan pergeseran nilai ruang. Pola kegiatan ritual semula dilaksanakan di mata air kemudian dilakukan di area reklamasi yang berhubungan langsung dengan perairan laut. Perubahan spasial ritual yang terjadi mempengaruhi persepsi masyarakat akan nilai kesakralan ruang mata air sebagai ruang ritual dan menjadi identitas ruang permukiman Sulaa selama ini.

## 5. Kesimpulan

Perubahan spasial permukiman Sulaa pasca reklamasi pantai terjadi pada skala mikro dan meso (kawasan) permukiman. Perubahan skala meso mencakup (i) perubahan pola tata ruang permukiman yang cenderung terkonsentrasi ke area reklamasi pantai, (ii) perubahan pola ruang sosial, ekonomi dan budaya masyarakat cenderung berorientasi ke area reklamasi pantai. Perubahan spasial permukiman juga diikuti dengan perubahan pada skala mikro, yang mencakup perubahan bentuk dan struktur bangunan dari rumah non permanen ke rumah permanen, perubahan organisasi ruang di dalam rumah dengan penambahan ruang baru, perubahan arah orientasi dan fasade bangunan, serta pergeseran fungsi dan nilai ruang di dalam rumah.

Implikasi reklamasi pantai terhadap perubahan spasial permukiman Sulaa berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Dalam skala meso (kawasan), terjadi

kepadatan bangunan dengan pertumbuhan bangunan yang terkonsentrasi di area reklamasi yang akan berpotensi pada tumbuhnya area permukiman kumuh baru. Terjadi perubahan persepsi dan pola ruang kegiatan budaya dalam ruang permukiman yang berimplikasi pada hilangnya ciri khas budaya masyarakat pesisir Sulaa selama ini. Dalam skala mikro, perubahan bentuk dan struktur bangunan, organisasi ruang, dan fasade bangunan rumah akan semakin mereduksi persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap bangunan arsitektur tradisional Buton di permukiman Sulaa yang menjadi bangunan fungsional dan kebanggaan masyarakat selama ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penentu kebijakan dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan kawasan pesisir yang berbasis potensi lokal dan sosial budaya masyarakatnya. Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Baubau dan Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan izin penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi data dan masukan terhadap tulisan ini.

#### Daftar Pusaka

- Antoniades, Anthony C., 1990, *Poetics of Architecture, Thory of Design*, Van Nostrand Reinhold, New York.
- Dahuri, R., Rais, J.G., Saptu P., dan Sitepu, M.J., 1996, *Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Paradnya Paramita, Jakarta.
- Doxiadis, A. C., 1968, *Ekistics, An Introduction to The Science of Human Settlements*, Hutchinson of London.
- Habraken, N.J., 1982, *Transformations of The Site*, Cambirdge, Massachusetts, Summer.
- Haryadi, Setiawan, B. (2010), *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*, Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kadir, I., Djunaedi, A. Sudaryono, Wibisono, B.H., 2013, Simbol pada Elemen Rumah Tradisional Buton di Permukiman Pesisir Sulaa Kota Baubau, *Prosiding Seminar Nasional Reinterpretasi Identitas Arsitektur Nusantara*, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana, Denpasar, 2.47-2.54.
- Kadir, I., Djunaedi, A. Sudaryono, Wibisono, B.H., 2014, Eksistensi Ruang Mata Air Topa di Permukiman Sulaa Baubau, *Prosiding Seminar Nasional SERAP*, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, UGM, Yogyakarta, 131-137.
- Mattulada, 1977, *Kebudayaan Suku Bangsa*, paper, Widya Karya Nasional Antropologi Pembangunan, Jakarta.
- Prayitno, B., 2004, *Rekayasa Perancangan Ekologis Kawasan Permukiman Tepi Pantai*, makalah pada Simposium Nasional Rekayasa Aplikasi Perancangan dan Industri II, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rapoport, A., 1969, *House Form and Culture*. Prentice-Hall. Inc. Ngelwood Cliffs. N.J.
- Rapoport, A., 1977, *Human Aspects of Urban Form*, Pergamon Press, USA.
- Silas, J., 1985, *Perumahan dan Permukiman*, Jurusan Arsitektur, FTSP-ITS, Surabaya.
- Supriharyono, 2002, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wahab, A., Samik, 1998, *Perubahan Pantai dan Kajian Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah*, Laporan Penelitian, LPM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wunas, S., Lumain, J.H., 2003, Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Penduduk di Kota Manado, *Jurnal Penelitian Enjiniring*, Vol.9, No.3, September-Desember 2003, 325-330.